

DAFTAR PUSTAKA

- Al Khanif, 2017, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Perspektif Hukum HAM*, Thafa Media. Yogyakarta.
- Andika R. Surya, 2021, "Budaya Hukum Tenaga Kesehatan dalam Implementasi Sistem Perizinan Elektronik," *Jurnal Etika & Hukum Kesehatan* 6, no. 2.
- Anggi Yulianti dan Dimas Prasetyo, 2019, *Negara dan Hak Kesehatan: Analisis Konstitusional terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pelayanan Kesehatan*. Prenada Media, Jakarta.
- Amir A, 2020. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. EGC.
- Basiang M, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bayu Dwi Anggono, 2021, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Budhi Rahardjo, 2020. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Deepublish.
- Dita Yuliana dan Dedy Permadi, 2020, "Jaminan Hak Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan dan Kompetensi Tenaga Medis," *Jurnal Konstitusi dan Pelayanan Publik* 3, no. 2.
- Edi Abdullah J, 2025. *Hukum Kesehatan Dan Tindak Pidana Kesehatan Di Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta.
- Fatmawati, D, 2020. *Hukum Kesehatan dan Etika Kedokteran*. Setara Press, Malang.
- Farizal Rizky (2024). Adequacy and Distribution of the Health Workforce in Indonesia. *WHO South East Asia J Public Health*. 2024 Jul 1;13(2):45-55. doi: 10.4103/WHO-SEAJPH.WHO-SEAJPH_28_24. Epub 2025 Feb 21. PMID: 39995001, diakses 17 Juni 2025.
- Fitria Ismulyanto, 2020, "Analisis Perlindungan Hukum dalam Perizinan Tenaga Kesehatan," *Jurnal Hukum dan Kesehatan Indonesia* 5, no. 2.
- Heru Susetyo, 2021, "Hak Konstitusional Profesi Kesehatan dan Perlindungan Hukum Administratif," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4.
- Hadjon PM, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*

Negera. PT Bina Ilmu.

Hasdam S, 2009. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Mulia Indah.

Indrawati PD, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif: Manajemen Dan Bisnis Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Refika Aditama.

Jimly Asshiddiqie, 2019, *Konstitusi & Hukum dalam Kontroversi Isu*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum*. KONPress.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Platform SatuSehat dan Plataran Sehat sebagai Pendukung Pembelajaran Berkelanjutan Tenaga Kesehatan, 2023. Diakses dari <https://satusehat.kemkes.go.id>, diakses 20 Juli 2025

Kementerian Kesehatan RI, “Pedoman Implementasi Platform Perizinan Praktik Dokter Terintegrasi,” kemenkes.go.id, diakses 28 Juli 2025.

Kementerian Kesehatan, 2023. *Buku Saku UU NOMOR 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Kementrian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024. *Implementasi Registrasi Dan Perizinan Sesuai UU No . 17 Tahun 2023*. Kementrian Kesehatan.

Kompas. Dokter di Daerah Keluhkan Ambiguitas Aturan SIP. 2023, 9 Oktober. Diakses dari <https://www.kompas.id>, diakses 20 Juli 2025

Luluk Lusianto dan Fitriani, 2021, *Perlindungan Hukum Profesi Kesehatan dalam Perspektif Hukum Kesehatan Nasional*. Deepublish, Yogyakarta.

Litnus TP, 2023. *Undang-Undang Kesehatan Terbaru: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Beserta Penjelasannya*. Literasi Nusantara.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia.” *Rechts Vinding* 6, no. 2.

Muhammad Yusuf, 2024, “Peran dan Tanggung Jawab IDI dalam Membantu Dokter yang Bermasalah”. *Jurnal Intelek & Cendikiawan Nusantara*. E-ISSN: 3046-4560.

Marzuki PM, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mamudji SS& S, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.

Ningsih KP, 2023. *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*. Pradina Pustaka,

Yogyakarta.

Prakoso Abintoro, 2016. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran, Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*. LaksBang Pressindo.

Prof. Dr. H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, S.H. L, 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. 3rd ed. Rajagrafindo.

Pierre, A. J., & Donnelly, J., 1990. *Universal Human Rights in Theory and Practice. Foreign Affairs* (Vol. 69).

Rachmat, I, 2019. *Hukum Pelayanan Kesehatan di Indonesia (Perizinan Tenaga Medis dalam Perspektif UU Kesehatan)*. Deepublish. Yogyakarta.

Republik Indonesia, UUD RI 1945.

Republik Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Permenkes Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan.

Republik Indonesia, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Republik Indonesia, Surat Edaran Menkes No. HK.02.01/MENKES/1241/2023 tentang STR Seumur Hidup dan SIP Digital.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Rizka Aria Ristania dan Muhammad Hidayat, 2022, "Efektivitas Layanan Pengaduan Tenaga Kesehatan dalam Menjamin Hak Profesi," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan* 9, no. 1.

Rospita Adelina Siregar MHK, 2023, *Hukum Kesehatan : Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Sinar Grafika.

Salim H, Penerapan, 2024. *Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo, 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Satria Indra, 2023. "Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan". *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* Vol.1, No.4 (2023). e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 143-156. DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.731>, diakses 20 Juli 2025.

- Sholihah, et al, 2024, "Analisis Implementasi Kebijakan Perizinan Dokter di Kabupaten Bekasi". *Media Gizi Kesmas*, Vol 13 No 1.
- Sihombing, Jefri, 2020, "Perubahan Regulasi Kesehatan dalam Perspektif Hukum Positif dan Perlindungan Hak Tenaga Medis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3.
- Siti Nurjannah, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dalam Perspektif HAM," *Jurnal Hukum dan Kesehatan Indonesia* 7, no. 1.
- Siregar RA, 2020, *Hukum Kesehatan Jilid I*. Vol 1. UKI PRESS.
- Soekanto, S, 2019. *Efektivitas Hukum dan Peranannya dalam Masyarakat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto S, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Sumanto, A, 2020, *HAM dalam Perspektif Hukum dan Politik*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Syahputra, R., Ardiansah, H., dan Kadaryanto, B., 2022, "Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol 7 No 1.
- Tambunan, H, 2021. *Praktik Kedokteran dan Aspek Hukumnya*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Triana, Y, 2024. "Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023". *Jurnal Kesehatan Tambusai*.
- Wahyu P. Nugroho, 2022, "Birokrasi Perizinan dan Tantangan HAM dalam Sektor Kesehatan," *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara* 6, no. 2.
- Widhiantoro, D. C. 2021, *Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Lex Privatum.
- Winda Cahyaningtyas, 2024, "Analisis Pelaksanaan Perizinan Praktik Dokter Pasca UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 3, no. 2.
- Walikota Manado, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019.

Walikota Manado, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

Walikota Manado, Peraturan Walikota Manado Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Manado.

